

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Dominasi Golkar di Kabupaten Bone Pasca Reformasi

Penelitian ini akan menjelaskan dan menklaborasikan dari teori yang digunakan tentang konsep dominasi yang dikemukakan oleh Max Weber yang menjelaskan konsep dominasi birokrasi adalah menguasai birokrasi yang menjadikan aparat birokrasi menjadi partner kerja dan partner politik yang bisa ikut serta memenangkan partai pada setiap pemilu. Pasca pemilu terjadi pengangkatan jabatan karna faktor kontrak politik antara birokrasi dan pemerintah yang terpilih. Kemudian penulis mencoba mengambarkan bagaimana peristiwa birokrasi yang terjadi di Kabupaten Bone apakah sesuai dengan teori yang ada. Pemerintah daerah Bone menguasai birokrasi menggunakan dengan berbagai cara yaitu menjadikan birokrasi bagian dari simpatisan partai kemudian pasca pemilu akan dimutasi birokrasi yang menjadi tim sukses Golkar kejabatan yang lebih strategis. Kemudian konsep dominasi sosial yang dikemukakan oleh Hidanius dan Pratto yang memaparkan bahwa unsur terjadinya dominasi sosial yaitu lebih condong dalam dinamika perpolitikan atas unsur ras, agama, kelas, sosial dan klan. Dalam peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bone penulis melihat dari sudut pandang klan-klan yang berokmpitisi untuk mendaptkan Golkar. Maka tidak heran jika terjadi perhelatan politik diinternal partai Golkar antara klan-klan yang besar yang ada di Kabupaten Bone. Yang masing-masing memperebutkan Golkar sebagai tulang punggungnya untuk mengantarnya duduk dibangku pemerintahan. Kemudian dominasi kekuasaan dan politik menurut Whindu dan David yang memukakan dominasi politik dan kekuasaan yang cenderung busuk dengan cara meraih kekuasaan akan menjadi pemegang kendali kebijakan sehingga

banyak kemungkinan bisa terjadi penindasan. Dalam peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bone penindasan memang tidak terjadi secara kasat mata namun kepentingan-kepentingan yang dibawa untuk terbentuknya sebuah kebijakan lebih dominan kepentingan dari partai penguasa ketimbang kepentingan rakyat.

Untuk lebih detail terkait bagaimana perhelatan politik melalui dominasi birokrasi, sosial dan politik di kabupaten Bone penulis akan menjabarkan beberapa poin pada pembahasan berikut;

1. Dominasi Birokrasi

Kajian tentang netralitas antara birokrasi dan politisi di Indonesia terkait netralitas pegawai dalam menjalankan tugas. Pada hakekatnya ada perdebatan antara menjaga netralitas pegawai dan harus patuh terhadap atasan sudah ada perbedaan pandangan mulai sejak berkembangnya tentang konsepsi birokrasi. Yaitu antara pandangan Karl Max dan Hegel yang menyoroti tentang netralitas birokrasi atau pegawai. Karl max adalah orang yang pertama mengkritik dan menganalisis konsep netralitas birokrasi dalam sebuah negara yang dikeluarkan oleh pendapat Hegel, sedangkan Hegel mendeskripsikan birokrasi adalah suatu medium yang menghubungkan negara dan masyarakat.

Masyarakat mewakili kepentingan khusus sedangkan negara mewakili kepentingan umum. Diantara keduanya terletak antara birokrasi pemerintah yang melayani atau menjembatani aspirasi dari masyarakat menurut Hegel, sedangkan Max berpendapat bahwa negara itu tidak mewakili kepentingan umum akan tetapi kepentingan khusus atau dominan (atasan). Jika dilihat dari sudut pandang keduanya birokrasi adalah menifestasi dari kepentingan sosial yang amat khusus.

Kemudian akan melakukan tindakan dominasi kelas terhadap kelas lainnya. Terjadilah sudut pandang yang berbeda dan antara pro dan kontra. Bagi Hegel Birokrasi harus netral sedangkan Karl Max harus tidak netral karena birokrasi berada dibawah intruksi kelas yang dominan.

Netralitas birokrasi dalam sebuah negara dalam praktek politiknya selalu ada keterlibatan birokrasi dalam urusan politik. Maka jangan heran birokrasi tidak akan menjalankan tugasnya dengan baik. Karena apabila tidak memberikan program alternatif maka bisa saja birokrasi akan terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik yang mencari ruang untuk menguntungkan dirinya. Karena pada dasarnya konsep dari keduanya saling membutuhkan meskipun secara aturan tidak diperbolehkan. karena ciri khasnya adalah birokrasi adalah suatu insitusi yang berjenjang, rekrutment berdasarkan keahliannya, dan berifat impersonal. Sedangkan elit politik (pemerintah) adalah usaha untuk menentukan kebijakan yang mendapat dukungan birokrasi untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Maka jangan heran apa yang terjadi negara kita karena keduanya saling membutuhkan dalam hal ini Birokrasi membutuhkan dukungan politisi untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya dan begitupun sebaliknya politisi membutuhkan dukungan dari birokrasi agar dapat memutuskan dan jadi eksekutor dalam kebijakan publik tersebut. Sehingga hasil dari keduanya akan terjadi muara politik yang dominan menguasai kelas sosial lainnya.

Birokrasi adalah suatu sistem yang dibentuk sebuah organisasi yang sengaja dirancang untuk menjadi pelayang masyarakat yang sesuai dengan standar undang-undang yang rasional dan sistematis. Banyak tujuan birokrasi

yaitu mengkoordinasi dan mengarahkan berbagai aktifitas yang ditugaskan menyelesaikan administratif. Tentu dalam aturan birokrasi pemerintahan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan tentu membutuhkan tenaga kerja (ASN) aparatur sipil negara yang harus profesional kerja dan netral. Karena dalam pengangkatan, pemindahan dan memberhentikan pegawai harus sesuai aturan dalam arti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam birokrasi kita di Indonesia terjadi mutasi jabatan tidak searah dalam aturan undang-undang karena terlihat tidak netral dan profesional.

Ini yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang terpilih selaku Pembina kepegawaian di tingkat daerah justru memanfaatkan momen politiknya, karena yang di prioritaskan adalah orang terdekat, ada hubungan kekerabatan atau balas jasa. Sama halnya yang terjadi di Bone “Semenjak Andi Fahsar Padjalangi dilantik, dalam rentan tahun 2013-2015 telah melakukan beberapa pelantikan dan pergeseran di pemerintahan daerah mulai dari eselon II, III dan VI. Dalam pelaksanaannya banyak pegawai yang dirotasi, permosi, dan demosi. Hal tersebut tentu dilakukan untuk penyegaran dalam organisasi serta evaluasi terhadap pegawai agar mewujudkan visi, misi yang ingin dicapai oleh Bupati” (Roslan: 2016).

Adanya mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala perubahan jabatan seseorang pegawai dalam arti umum. Perubahan. Dalam konsep mutasi jabatan sejatinya menjunjung aspek-aspek profesionalitas yang jadi pokok utama. Yaitu konsep *the right man on the right place* untuk menjadi landasan utama untuk membentuk sebuah birokrasi pemerintahan. Menurut Max

Weber yang memukakan bahwa birokrasi itu ibarat sebuah mesin yang siap menjalankan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintahan tanpa terkontaminasi dengan tujuan atau kepentingan pribadi. Maka dengan pernyataan dengan Max Weber bahwa sebagai seorang birokrat harus menghindari politik untuk tetap menjaga profesionalitasnya, kecuali untuk melaksanakan tugasnya dan sesuai dengan prosedur yang ada. Jika itu dijaga maka tujuan utama dari birokrasi adalah netralitas, profesional dan berkompeten dibidangnya.

Adapun tujuan untuk mutasi jabatan atau pemindahan jabatan yaitu untuk penyegaran birokrasi agar produktivitas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Untuk merangsang itu semua tentunya adanya evaluasi untuk perbaikan penempatan yang belum sesuai dengan indikator atau tidak memuaskan dalam kerja. Hal ini sesuai dikemukakan inisial AI

“Mutasi dilakukan sebagai penyegaran pada organisasi pemerintahan daerah yang didasarkan pada kebutuhan pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong serta evaluasi kinerja pegawai untuk meningkatkan kinerja, dasar pelaksanaannya mutasi diatur sesuai peraturan pemerintah No. 100 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2002”.

Dalam mutasi dilakukan agar menghindari kejenuhan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan aturan yang ada. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau disebut sekarang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dilakukan perombakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk menciptakan suasana nyaman dalam organisasi tersebut. Dilakukannya mutasi di Bone untuk mengganti pegawai yang dianggap tidak memuaskan dalam kinerjanya dan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Karena pada

hakekatnya dilakukannya mutasi karena untuk membantu pimpinan maka intruksi dari atasan harus dipatuhi oleh seorang birokrat. Akan tetapi dalam menentukan orang-orang yang akan diangkat dan mengisi jabatan yang kosong hanya sebatas formalitas dalam administrasi kepegawaian. Karena yang sering terjadi adalah khususnya di Kabupaten Bone hanya menunjuk dan mengisi jabatan kosong bagi orang-orang yang menyukseskan dalam kemenangan pemerintah yang terpilih, sehingga prinsipnya adalah hanya balas jasa politik. Maka kecenderungan mutasi jabatan itu adalah untuk menguasai birokrasi dengan dibawah garis intruksi dari pimpinan yang memang dapat bekerja sama sehingga kepatuhan dari birokrasi yang diangkat kurang professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam mutasi pertama dilakukan pada tahun 9 juli 2016 oleh bapak Bupati yang terpilih Andi Fashar Fadjalangi. Sebanyak 48 pejabat eselon II yang digeser dijabat pemerintah daerah. Proses mutasi ini tidak lepas dari kontrak politik antara pemerintah yang terpilih dengan pendukung pemerintah yaitu konsestasi PILKADA adanya balas jasa dari pemerintah yang terpilih. Memang dari pendukung yang loyal yang berhasil memenangkan Andi Fashar Fadjalangi mendapatkan jabatan yang strategis. Dalam wawancara SM selaku LSM di Bone.

“Pada mutasi pertama, kelihatan siapa-siapa yang mengisi jabatan penting. Hal ini dipengaruhi karena kontestasi dari PILKADA yang lalu. Jadi kelihatan orang-orang yang mengisinya dari tim Bupati, mereka yang berjasa dalam memenangkan Bupati, tim-tim loyalitas yang kentara pada saat kampanye mendukung Bupati, dan bisa ditanya, masyarakat tahu itu siapa-siapa pejabat yang termasuk tim iyyana’e atau Tafaddal” (LSM Kabupaten Bone).

Faktor adanya pergantian jabatan untuk membantu dan dapat bekerja sama dalam mutasi jabatan dibutuhkan orang yang sesuai dengan kompetensi yang

dibutuhkan oleh organisasi tersebut bukan malah orang yang tidak memiliki kualitas yang mumpuni akan tetapi ditempatkan posisi yang strategis. Pada mutasi jabatan di Bone tidak lain agar dapat mendominasi orang-orang Golkar atau simpatisan dari Golkar yang diangkat agar berada birokrasi pemerintahan di Kabupaten Bone. Sehingga setelah PILKADA ada kecenderungan politik busuk dalam birokrasi karena pertimbangan politik. Maka diangkatlah beberapa pegawai yang akan mengisi posisi yang strategis. Dalam wawancara yang berinisial MR.

“Faktor kekerabatan dalam mutasi itu kentara ada terutama pada saat suksesi pemenang beliau saat PILKADA. Banyak tim pemenangnya beliau diangkat di jabatan strategis, termasuk Kepala Dinas PU dan BKD. Itukan contohnya. Kepala Dinas BKD sekarang kan dulunya diluar tetapi setelah Andi Fashar Menjabat ditarik kembali di Bone”

Sebagai Pembina kepegawaian daerah yaitu Bupati harus melihat kapabilitas, kualitas dan perestasi pegawai sebelum dilakukan mutasi. Karena apabila itu dilakukan karena faktor kepentingan politik maka akan berdampak dalam kinerja kepegawaian. Pertama, Cenderung terjadi penyalagunaan kekuasaan *Abuse of power* terhadap birokrasi. Kedua, munculnya intervensi politik. Ketiga, birokrasi akan lebih patuh terhadap pimpinan. Maka sebagai pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk menunjuk dan mengangkat pegawai atau seorang birokrat, tentu akan melalui pertimbangan politik yang dapat bekerja sama dan loyal kepada pimpinan agar visi-misi dari Bupati dapat tercapai. Dalam wawancara Irwansyah orang dimutasi dari jabatan Bappeda Bone menjadi staf Khusus Sekda Bone.

“iya... terkesan memang itu semua wewenang Bupati menetapkan seseorang pada jabatan pemda, kesan itu masih muncul. Itu yang kita lihat dari luar, tapi kita kan tidak berada didalam. Orang yang diberhentikan

dari jabatan itu karena pelanggaran, tapi kan tidak ada, seperti tadi saya bilang lebih kepada persoalan investasi PILKADA itu” (Irwnasyah).

Maka dari pandangan saya terjadi ketidakadilan dari seorang Bupati dalam merekrut dan menjaring Birokrasi. Masyarakat akan melakukan tindakan penolakan atas keputusan dari Bupati yang menuai banyak kontra dikalangan masyarakat. Dari kalangan pergerakan mahasiswa turun kejalan untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap pemerintah. Yang dilansir dalam koran intel pos Watampone ditulis oleh Andi Wahyudi.

“Mutasi pegawai Pemkab Bone terindikasi sarat akan kepentingan politik. Mutasi itu tidak mengutamakan kepentingan publik. Kami tolak dengan tindakan yang dilakukan oleh Bupati Bone yang mementingkan dinasti politiknya.” Tegas Fadil

Kemudian ada anggapan bahwa banyaknya pejabat lain yang terancam akan tindakan Bupati tersebut karena takut diberhentikan sehingga kurangnya semangat kerja. Sambung dia

“Walaupun ini diperbolehkan dalam aturan dan merupakan hak prerogatif Bupati, namun yang perlu digaris bawahi ialah harus ada skala prioritas dalam progress pembangunan, jangan sibuk mutasi terus”. Tegas fadil

Melihat pernyataan diatas penulis menghubungkan antara dominasi kekuasaan dan dominasi birokrasi antara kepentingan politik yang berujung balaskasi terhadap birokrasi sehingga Golkar sebagai Partai penguasa wewenang untuk mengangkat pendukungnya untuk masuk dalam jabatan yang strategis sangat Nampak, dengan dukungan itu untuk mendominasi Birokrasi merupakan langkah agar birokrasi sejalan dengan Visi Misi dari Bupati. Dominasi Birokrasi di Bone yang cenderung adanya ikatan emosional antara penguasa atau pemerintah dengan

bawahan dengan menjanjikan dalam bentuk hadiah atau jabatan yang strategis di birokrasi pemerintahan.

Tabel.3.1 Kepala Dinas Yang Diangkat di Pemda Bone pasca PILKADA

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Herman SH, MH	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Bupati Bone	Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah
2.	Drs. Sudirman, S.St, M.Si	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Bupati Bone	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
3.	Drs. Aswar	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Sekertaris Daerah	Kepala Dinas Koperasi dan UKM
4.	Drs. Rosalin Hab, S.Sos, M.Si	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas Pendidikan
5.	Drs. H. Syarifuddin	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Asisten Bidang Tata Praja Setda Bone	Kepala Dinas Tata Ruang, Pemukiman Dan Perumahan
6.	Drs. Asiswa	Pembina Tk. IV/A	Staf Khusus Asisten Bidang Tata Praja Setda Bone	Kepala Dinas Perhubungan
7.	Drs. Andi Fajaruddin, MM	Pembina Tk. I. IV/B	Staf Khusus Bupati	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Ir. Wahidah M.Si	Pembina Tk. IV/A	Sekretaris Dinas PU dan SDA	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

Sumber: BKDD Kabupaten Bone

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Bone kembali melakukan mutasi jabatan pada tanggal 30 Juli yang terdiri sebanyak 234 pejabat eselon II, III, dan

IV dilakukannya mutasi jabatan di Kabupaten Bone sebenarnya melanggar dengan aturan-aturan yang ada atau bisa dikatakan cacat Yuridi. Hal ini diungkapkan inisial SM

“iya, ada beberapa kepala dinas Bupati sebelumnya diganti karena tidak sejalan, kelihatan sekali nuansa politisnya. Ketika orang-orang yang dianggap masih bisa menduduki jabatan tapi didemosikan sementara orang sudah memiliki catatan hukum diberikan jabatan” (SM).

Landasan hukum dalam pelaksanaan mutasi, mulai dari pengangkatan dan pemberhentian PNS pegawai negeri sipil tertera pada peraturan pemerintah No 43 tahun 1999. Tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaga Negara tahun 1999) tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai negeri sipil, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2000. Peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi dasar hukum bagi setiap instansi pemerintahan yang ada di Indonesia baik pusat maupun daerah. Namun aturan ini bagi penulis beberapa daerah akan cacat yuridis dalam pelaksanaannya terkhusus pemerintah daerah Kabupaten Bone. Dalam kasus mengangkat salah satu kepala dinas yaitu Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya pernah berkasus dengan kepolisian pada saat menjadi Kepala Dinas ESDM pada pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi akan diangkat kembali karena ada kepentingan politik dan merupakan tim sukses kemenangan Bupati maka ini adalah pelanggaran dalam proses mutasi jabatan birokrasi di Kabupaten Bone. Dalam pernyataan inisial HP dikutip dari penelitian sebelumnya (Roslan: 2016)

“menurut saya Bupati itu cacat yuridis, yang dilanggar adalah UU kepegawaian, kemudian UU penyelenggaraan Negara mengenai KKN, kemudian PP tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan structural, kemudian peraturan kepala BKN. Kalau kita mau menarik benang merahnya dari hasil mutasi, terutama pada mutasi pertama dan

kedua yang berimplikasi adanya gugatan. Maka sebenarnya dalam pelaksanaannya mutasi banyak tendensi politik, balas jasa banyak. Maka dengan cara prosedur itu tidak digunakan maka Bupati memanfaatkan kewenangan dengan salah, jadi mutasi itu tidak sesuai”. (HP)

Adanya anomali dari kepala kepegawaian (Bupati) dengan pengangkatan dan menetapkan keputusan terkait mutasi harusnya diangkat sesuai dengan kebutuhan instansi dan kedua kurang profesionalitas karena faktor kontrak politik. Perkembangan Politisasi birokrasi di daerah tidak terlepas dari hasrat politisi atau Partai yang menguasai untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar. Tindakan ini dilakukan dari Partai penguasa atau pengusung dari Bupati yang terpilih agar dapat memperkuat kekuatannya. Birokrasi pemerintahan daerah Bone sebenarnya ini sudah terjadi dimasa orde baru dimana Golkar menyebar dimana-mana agar bisa mendominasi dari segala arah meskipun sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah akan tetapi di pemerintah daerah Bone praktek politik seperti itu masih berlaku sampai saat ini.

Dalam perjalanan Golkar di Kabupaten Bone secara history memang ada ikatan emosional PNS dan Birokrat. Bahkan mereka bagian dari kader Golkar pada masa orde baru. Di Kabupaten Bone khususnya masih ada terdapat beberapa kawan politik dari Partai pemerintah diangkat karena kontrak politik pada masa kampanye atau sebagai pendukung Partai pemenang.

“Selaku Partai penguasa yaitu Bupati adalah Golkar, Wakil Bupati adalah Golkar, Camat adalah Golkar terus terang saya katakan seperti itu karena Bupati yang mengangkat semua tidak mungkin dia mau angkat lawan politiknya” (H. Rahman: 30/06/2018)

Pengangkatan camat atau lurah di Kabupaten Bone masih bertentangan dengan undang-undang No.5 2014 tentang kepegawaian ASN pasal 27 KASN

merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai Partai penguasa atau pemerintah memiliki kekuatan tersendiri untuk menentukan siapa yang akan diangkat sebagai pembantu pemerintah. Sebagai aparatur negara yang telah diatur dalam undang-undang dimana seorang ASN atau Camat dan Lurah senantiasa menjaga netralitas dalam berpolitik keberpihakan kepada Partai penguasa sautu hal menunjukkan ketidak taatan dalam menjalankan undang-undang. Dalam percakapan warga pasca PILKADA 2018 di Kabupaten Bone.

“Saat ini banyak camat ketakutan akan dilempar dari Bupati apabila suara dikecematannya mendapatkan sedikit suara” (Ardi: 19/07/2018).

Sebagai pernyataan diatas masyarakat umum dapat menilai bahwa adanya tekanan politik dari atasan atau pemerintah apabila dalam suatu kecamatan dukungan terhadap pemerintah tidak mencapai 50% maka ada ancaman dipindahkan ke daerah yang lebih jauh dan tertinggal. Maka hal ini telah terjadi keberpihakan dari birokrasi di Bone untuk mendukung calon *incumbent* agar mendapatkan tugas yang lebih nyaman dan strategis. Tentu ini melanggar dan bertolak belakang dengan undang-undang yang ada. Yaitu harus bekerja secara adil dan netral. tentu hal ini yang diinginkan masyarakat untuk menjadi pelayan yang baik dan profosional harus menghindari dalam keberpihakan dalam politik demi terciptanya birokrasi yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.

2. Dominasi Sosial

Pada pengangkatan raja dan golongan bangsawan di Bone untuk menjadi pemerintah daerah dan birokrasi merupakan efek dari masa penjajahan Belanda. Pengangkatan ini diwarnai oleh para kaum bangsawan yang memiliki gelar *Andi, petta* atau *puang*. Sampai saat ini dogma itu masih ada pada masyarakat dimana elite bangsawan masih mendominasi dalam pemerintahan dan birokrasi di Kabupaten Bone. Sehingga dapat dikatakan elit kultural akan menjadi elit struktural. Akan tetapi dalam mencapai kekuasaan dimana kaum elit bangsawan tidak hanya sampai pada status bangsawannya namun dikuatkan juga dalam Pendidikan yang tinggi, dan harus melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk meningkatkan reteng status sosialnya. Karena melalui kekuatan bangsawan dan pendidikannya kesempatan untuk menduduki jabatan politik lebih mudah diraih dari pada masyarakat pada umumnya.

Dengan peristiwa yang ada bahwa di Kabupaten Bone politik dinasti atau dominasi sosial masih terjadi sampai sekarang dengan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan, politisi di Kabupaten Bone mewariskan organisasi kemasyarakatan yang terlibat langsung pada masyarakat agar meningkat reteng popularitasnya. Organisasi sosial masyarakat merupakan sayap Partai politik untuk melebarkan sayapnya sampai kebawa agar terlibat dalam kegiatan sosial. Setelah figur itu terbangun di masyarakat melalui kegiatan sosial yang sudah dilakukan. Kemudian langkah selanjut memasukan Partai politik penguasa agar bisa menjadikan kendarahan politik untuk mencalonkan diri di Legislatif maupun Eksekutif.

Fungsi dari Partai politik tidak lepas dari rekrutmen politik yang baik. Adanya politik kekerabatan atau politik dinasti akan mencedarahi alur persyaratan dari Partai politik. Fungsi yang paling utama adalah rekrutmen politik yang akan menjadi penggerak Partai dan pendukung Partai yang akan mengisi jabatan politik. Dalam proses pencalonan biasa ada persyaratan dan indikator tersendiri dari Partai yang sesuai alur kebijakan Partai, baik itu mengenai dengan popularitas, elektabilitas dan rekam jejak, karir politik dan loyalitas pada Partai.

Monopoli atau mayoritas dalam sebuah Partai politik dikuasai maka akan terjadi politik kekerabatan, dimana kekuasaan dalam Partai tersebut terpusat pada satu klan atau keluarga tertentu dan akan membuat nilai demokrasi dalam Partai akan tradistori. Sekalipun kewenangan tertinggi berujung kesepakatan Partai untuk di calonkan akan tetapi pola rekrutment Partai cacat, dalam hal ini kedudukan dari klan tersebut menduduki di posisi strategis dalam struktur Partai. Kemudian ini lah kekuatan politik klan dalam peristiwa Partai politik Golkar di Kabupaten Bone.

Tabel.3.2 Klan Politik Partai Golkar di Kabupaten Bone

No	Nama	Jabatan	Partai	Jabatan dalam Partai
1.	Andi Yaqin Pandjalangi	Anggota DPRD Sul-Sel (2004-2009 dan 2009-2014)	Golkar	Wakil ketua DPD I Golkar Di Sul-Sel
2.	Andi Fashar Padjangi	Bupati Bone (2013-2018 dan 2018- 2023)	Golkar	Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bone
3.	Andi Rio Idris Padjalangi	Anggota DPR RI (2004-2009)	Golkar	Wakil Bendahara Golkar Sul-Sel
4.	Nurdin Halid	Mantan DPR RI	Golkar	Ketua DPD I Golkar Kabupaten Bone
5.	A. kadir Halid	Anggota DPRD Sul-Sel (1999-2004 dan 2009-2013)	Golkar	Wakil Ketua DPD Golkar
6.	Andi Idris Galigo	Bupati Bone (2003-2008 dan 2008- 2013)	Golkar	Ketua DPD II Golkar di Kabupaten Bone 2012
7.	A. Irsyan Irsan Idris Galigo	Anggota DPRD Sul-Sel (2009-2014)	Golkar	
8.	Ambo Dalle	Wakil Bupati (2013-2018)	Golkar	Wakli Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bone
9.	Ade Feri Afrisal		Golkar	Kader Golkar (HAM dan Perundang-undangan)

Sumber berbagai Media dan hasil wawancara

Dominasi sosial dalam tubuh Golkar dipandangan masyarakat Bone belum terlihat secara jelas karena perkembangan politik di Bone masih beputar pada

pemuda dan politisi sehingga masyarakat digugah dengan politik klan yang ada mereka hanya mengetahui calon tersebut apabila memiliki garis keturunan bangsawan maka itulah yang cocok untuk menjadi pimpinan masyarakat.

Akan tetapi dalam teori dominasi sosial yang cenderung membentuk hirarki yang berbenturan dengan dinamika politik Golkar di Kabupaten Bone. Golkar di Bone memang diminati dari berbagai politisi yang masing-masing membutuhkan Golkar sebagai kendaraan politiknya sehingga adanya kepentingan politik dari berbagai elit Golkar maka muncul niat untuk menyikatkan Klan yang menguasai Golkar sejak pasca reformasi. Pada tahun 2013 dinamika penetapan calon Bupati berlangsung dilematis dalam pelaksanaannya karena adanya kepentingan antara ketua DPD II Golkar dengan DPP Golkar, yaitu ketua DPD II Golkar Bone yaitu Idris Galigo berkepentingan untuk mencalonkan anaknya untuk dicalonkan Bupati pada periode 2013-2018 sedangkan klan dari Nurdin Halid sebagai pengurus pusat berkepentingan untuk mengangkat A. Fashar sebagai calon Bupati dari Golkar. Sebenarnya kedua didasari dengan kepentingan politik. Penjelasan Ambo Dalle selaku Wakil Ketua DPD II Golkar Bone.

“Partai Golkar menganut sistem survei apakah kader maupun nonkader pada saat itu yang memenangkan survei A. Fashar, anaknya Bupati waktu itu tidak memenangkan survei akhirnya dia tidak dicalonkan maka pada saat itu anak Bupati independent karena Partai tidak ada yang mendukung maka begitulah sistem survei yang digunakan pada 2013. Dampaknya ketua Partai Golkar pada saat itu diberhentikan karena tidak patuh dengan Partai, maka terjadilah perpecahan internal tapi Golkar pada saat itu cepat diselesaikan perpecahan internal” (Ambo Dalle: 13/06/2018)

Dalam peristiwa ini bahwa Golkar pada saat itu mengalami perpecahan internal antara kepentingan politik masing-masing klan yang ingin mempertahankan kedudukannya. Banyak diantara pengikut dari keduanya yang

merasa kala dari PILKADA banyak kader-kader yang kemudian mengundurkan diri. Sesuai dimuat dalam koran rakyatsulsel.com yang ditulis pada 27 september 2013.

“kondisi Partai Golkar di Bone agak memperhatikan pasalnya beberapa pengurus Partai mengundurkan diri, mulai pengunduran dari ketua DPD II Golkar, HAM Idris Galigo, kini pengrus DPC tingkat kecamatan dan desa/lurah juga turut mengundurkan diri.

Maka setelah itu adanya komentar dari Akbar Yahya sebagai ketua tim Bapilu, menanggapi hal tersebut. “Dengan adanya pengunduran diri dari pengurus tersebut tidak akan menghambat langkah Golkar, kemudian disambung bahwa saya himbau untuk para kader agar jangan mudah terpancing dan emosi. Ingat kita dibesarkan oleh Golkar”.

Dari sini bisa dinilai bahwa Golkar sangat dinamis karena tidak tertuju hanya klan tertentu untuk menjadi penguasa Golkar di Bone maka berbeda dalam teori dominasi sosial bahwa kecenderungan untuk membentuk hirarki dalam sistem politik terpatahkan dalam peristiwa politik klan di Bone. Tanggapan dari Ardianto sebagai pengamat perkembangan politik di Bone.

“Golkar itu menarik pikiran saya Golkar itu akan hirarki, dari Idris Galigo akan mewariskan ke anaknya akan tetapi terbantahkan pada tahun 2013 karena yang jadi calon pada saat itu A. Fashar, ini menarik dikaji” (Ardianto, 4/6/2018).

Pandangan penulis dalam dinamika tersebut hanya ada kepentingan politik dari klan-klan besar yang ada di Bone. Namun peristiwa ini tidak menyebar luas dikalangan masyarakat sehingga hal tersebut bagi Golkar tidak akan berlangsung lama, namun jika dilihat problematika yang terjadi memang kepentingan dari beberapa klan di Kabupaten Bone memang saling sikut untuk memperebutkan Golkar untuk duduk di pemerintahan. Maka bisa disederhanakan bahwa kekuatan Golkar di Bone bisa menjadi penentu bagi klan-klan politik yang memiliki figure yang kuat dimata masyarakat.

kemudian Golkar kembali ke prinsip awal dengan membumikan nama-nama yang memiliki figur yang kuat dan yang memang bisa menjaga popularitas Golkar di Bone. Maka politisi dan Golkar kembali memanfaatkan hal tersebut yaitu akan mendapat dukungan dengan masyarakat apabila ada hubungan darah dengan politisi yang memiliki garis keturunan bangsawan dan klan politik yang sudah dikenal oleh masyarakat. Dalam pernyataan (Suaidi) mantan dari kader Golkar.

“Golkar itu dimata kami baik karena keluarga saya Golkar semua baik om, sepupu adalah Golkar walaupun saya masuk Demokrat tapi saya keluarga besar Golkar, yaa memang begitu karena rata-rata di Bone itu begitu siapa yang klan keluarganya besar seperti halnya di Bone selatan saya keturunan raja karena akan kembali ditarik dari Golkar bisa saja kami baku lawan ditarik dari orang yang memiliki klan yang dikenal, tentu yang paling siap adalah Golkar sebagai Partai tertua Prof, Dr dan Andi-andi itu semuanya disitu”. (A. Suadi: 25/06/2018)

Politik klan dan kekerabatan dalam tubuh keluarga para elit politik merupakan strategi untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Untuk tetap menjaga eksistensi Golkar di Kabupaten Bone ini salah cara untuk menjaga suara, yaitu menjaga simpatisan kemudian merekrut kader-kader yang memiliki kedekatan keluarga yang ada garis bangsawan dan memiliki figur yang kuat ditengah masyarakat. Melalui alur politik kekeluargaan akan mencalonkan keluarganya sendiri agar dapat melanjutkan tongkat estapet dan masih terlibat dalam kepentingan politik. Meskipun dalam praktek politik yang sebenarnya berlawanan politik dalam keluarga itu sendiri akan tetapi kepentingan-kepentingan elit dalam keluarga tersebut searah dengan memperjuangkan hak politiknya untuk kepentingannya klanya sendiri. Tentu ini akan mewariskan

demokrasi yang tidak sehat dalam hal ini kepentingan rakyat tidak lagi menjadi prioritas melainkan kepentingan Partai atau kepentingan klan politik.

Maka dalam kacamata pandangan penulis Demokrasi di Kabupaten Bone masih diwarnai dengan dominasi sosial yang dikuasai oleh kelompok sosial yang memiliki sumber daya yang baik dan memiliki otoritas kekuasaan. Status sosial yang ada dalam teori dominasi sosial dalam berpartisipasi politik ada kecenderungan untuk menguasai terhadap masyarakat umum, kepentingan-kepentingan dari kelas klan tertentu lebih diprioritaskan dari kepentingan dari masyarakat meskipun jumlahnya lebih sedikit.

3. Dominasi Politik dan Kekuasaan

Pesta demokrasi pasca reformasi setiap pemilu di Kabupaten Bone baik eksekutif maupun legislatif Golkar dominan meraih kemenangan dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD dan suara terbanyak di pemilihan kepala daerah, karena yang menjadi kekuatan Golkar untuk terus dominasi Bone salah satunya faktornya adalah memanfaatkan efek orde baru dengan doktrin Partai kuning yang ada pada pola pikir masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat memilih Golkar karena bukan faktor program kerja dan juga bukan dari kader yang kuat akan tetapi Golkar memanfaatkan keadaan yang ada dengan *dugma* masyarakat. Pada penjelasan Ardianto sebagai alumni pergerakan HMI.

“Antusias masyarakat Bone dalam berpolitik masih terjaga, khusus Partai Golkar sebagai Partai yang lama dimana masyarakat telah terdoktrin sampai sekarang bukan karena kadernya dan bukan karena programnya tapi *dugma* terbangun dimasyarakat masih ada sampai sekarang”.
(Ardianto: 4/6/2018)

Antusiasnya masyarakat Kabupaten Bone dalam Pileg ataupun PILKADA masih ada dugma yang terbangun dalam masyarakat meskipun dalam perkembangan masyarakat Bone secara kualitas Pendidikan dan jiwa kritisnya pemuda sudah nampak namun yang masih dugma dengan Golkar yaitu pemilih yang umur 50-60 dan pemilih 30-40 tahun yang memang sudah setia dengan Golkar. Sehingga kader-kader Golkar masih mencoba mensosialisasikan dengan membangun paradigma tersebut. Pernyataan tersebut dibenarkan dengan wakil ketua DPD II Golkar di Bone sekaligus sebagai wakili Bupati.

“Pada tahun 2004, Golkar memiliki strategi dengan adanya pemilih tradisional dan fanatik. Memang dulu itu dari peralihan orde baru ke reformasi yaitu memilih akarnya itu pemilih partnerlistik yang menjadi tokoh disuatu tempat sehingga itulah yang diikuti jadi itulah yang masih sulit dari Partai lain menandingi itu. Misalnya yang tokoh di daerah ada kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, keamanan kalau tidak salah waktu itu ada 11 sampai 12 tokoh maka tokoh-tokoh ini adalah yang berpengaruh karena pada dasarnya mereka waktu orde baru adalah kader Golkar meskipun pasca reformasi tapi tidak langsung ada perubahan dan mereka masih panutan bagi masyarakat Golkar memanfaatkan itu dan sampai sekarang masih ada itu”. (Ambo Dalle:15/06/2018)

Dalam penjelasan wakil ketua DPD Golkar bahwa memang masih memanfaatkan pemilih tradisional. Dengan pemilih tradisional ini pasca reformasi tidak langsung ada perubahan pada masyarakat. Yang dimaksud pemilih tradisional adalah mereka yang sekarang yang berusia 50 sampai 60 tahun, maka yang inilah dugma yang ada pada masyarakat. Kemudian Golkar bukan hanya cara itu yang dimanfaatkan tapi tokoh-tokoh masyarakat dipelosok yang pernah bagian dari Golkar masih dijaga hingga sekarang dalam arti ketokohan dari tokoh tersebut masih mengajak masyarakat untuk memilih kepada Golkar.

Dari masa kemasa Partai Golkar memiliki cara tersendiri untuk meraih kemenangan dengan berbagai cara untuk menjaga simpatisan dan kadernya. Sama halnya dalam pengalaman Golkar di pemilihan sebelumnya cara yang digunakan adalah memanfaatkan pemilih tradisional dan partnerlistik yang terus mengakar sampai kebawah.

Partai politik adalah organisasi yang artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif terlibat dengan masyarakat kemudian mencoba menguasai dan memusatkan perhatian terhadap organisasi Partai politik tersebut agar dapat kekuasaan di pemerintahan. Kemudian adapun persaingan politik antara Partai politik lain yang cenderung saling mempertahankan kedudukan untuk menguasai bagi saya itu suatu hal yang wajar dalam praktek politik karena ingin mempertahankan kekuasaan. Tugas Partai politik adalah menghubungkan ideologi sosial agar diangkat sebuah isu pemerintahan dengan membawanya sebuah kebijakan publik yang saling menguntungkan antara masyarakat kepentingan Partai tersebut. Karena perlu dipahami bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Partai politik khususnya Partai penguasa tercipta karena dasar cita-cita dari Partai politik yang bertujuan mencapai kepentingan bersama.

Unsur-unsur atau cara yang digunakan Partai Golkar di Kabupaten Bone bisa mendominasi dan menjaga kekuasaannya di DPRD adalah pertama tetap mempertahankan posisinya sebagai Partai politik yang memiliki kursi terbanyak di DPRD, kedua tetap menjaga kedekatan emosional terhadap kader-kader Golkar yang telah hijrah ke Partai lain, ketiga membangun koalisi dengan menjanjikan terhadap Partai lain dengan jabatan atau posisi strategis, keempat sebagai pokok

utama adalah selalu menawarkan program yang rasional untuk kemajuan masyarakat Bone, kelima lemahnya kekuatan Partai lain untuk membangun oposisi terhadap pemerintah agar tercipta *chek and balance*. Dalam wawancara pengurus DPD II Golkar.

“Kader-kader Golkar selama ini mereka rekrut tapi dalam hal ini Golkar hanya 15 kursi tapi Golkar ada dimana-mana maka itu juga menjadi jaminan bahwa *sporting* DPR ke Bupati masih terjaga walupun tidak mayoritas tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah itu tetap disupport karena disana orang-orang Golkar cuman beda Partai karena sesak maka mereka cari kamar-kamar” (Andi Irwansyah: 21/06/2018).

Golkar memang memiliki banyak cara untuk tetap sebagai pemegang kebijakan dengan cara apapun, meskipun lahirnya Partai-Partai baru pasca reformasi khususnya di Bone Golkar masih kokoh sebagai pemegang kekuasaan karena rekrutan kader-kader Golkar yang pindah ke Partai lain masih terus dijaga bahkan saling memberi dukungan dalam sebuah program pemerintah. Memang sebagai Partai pengusung pemerintahan selalu memiliki cara dalam mempertahankan kedudukan dan kekuasaan dalam penjelasan ketua fraksi Gerindra

“Pengadaan mobil dinas pada saat itu kami komisi I menyoroti kenapa ada pengadaan mobil dinas, menggunakan banyak anggaran jadi untuk apa. Tapi yah dengan dasar alasan kalau nanti pemilihan Bupati tidak ada mobil dinas, dan pada saat itu saya keluar dari situ dan tidak sepakat buat apa lagi. Jadi kita itu kalau kita sedikit mengikut saja. Secara objektif saya tidak menerima”. (H. Rahman: 30/06/2018)

Karena dalam internal DPR Golkar yang lebih dominan setidaknya sebagai Partai pengusung pemerintah mengabaikan beberapa permintaan dari pemerintah untuk kepentingan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan dari DPR terkait kepentingan dari pemerintah maka bisa dikatakan kedua Lembaga tersebut

saling mendukung program karena sama-sama dari Partai Golkar sehingga dampaknya adalah merugikan masyarakat luas karena hanya semata-mata hanya ingin mengabdikan permintaan pemerintah.

Partai politik harus menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk menyampaikan kepentingan masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera, kemudian Partai politik wajib menampung aspirasi masyarakat, untuk menjadi *out put* kebijakan dan keputusan yang berbihak kemasyarakat Partai politik harus merumuskan berbagai froblematika yang ada dimasyarakat kemudian dieperjuangkan menjadi sebuah kebijakan pro rakyat (Suliswati: 1987).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Bone dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi anggota DPR yaitu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat namun dalam perjalanannya masih sering terjadi hambatan karena persoalan kepentingan-kepentingan Partai yang dominasi kursi DPRD Bone. Kepentingan pemerintah dan Partai penguasa saling bergandengan dalam sebuah kebijakan meskipun di Internal di DPRD sering terjadi perdebatan akan tetapi hasil akhirnya tetap dimenangkan oleh Partai yang memiliki kursi mayoritas. Dominasi kekuasaan Golkar di Kabupaten Bone masih bergulir sampai saat ini, dalam perkembangan politik di Bone kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah sering terjadi kontroversi namun kontroversi itu hanya dikalangan politisi dan Lembaga kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, karena perkembangan politik masyarakat kurang mengetahui informasi apabila keluarnya sebuah kebijakan.

“Munculnya Partai politik baru, kader-kader Golkar selama ini mereka rekrut tapi dalam hal ini Golkar hanya 15 kursi tapi Golkar ada dimana-mana maka itu juga menjadi jaminan bahwa *sporting* DPR ke Bupati masih terjaga walaupun tidak mayoritas tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah itu tetap disupport karena disana orang-orang Golkar cuman beda Partai karena sesak maka mereka cari kamar-kamar” (Andi Irwansyah: 21/06/2018).

Dari pernyataan diatas tentu adanya kekuatan Golkar sebagai Partai yang memiliki penagalaman panjang di Kabupaten Bone yang melahirkan kader-kader berkualitas dan berpengalaman. Akhirnya akan ada kompetisi dalam internal Partai yang banyak kader berkualitas ingin maju dalam pesta demokrasi akan tetapi tidak mendapatkan ruang sehingga mereka pinda gerbong politik baru, namun dalam hal kebijakan dukungan-dukungan terhadap Golkar sebagai Partai penguasa dalam pemerintahan Bone. Tentu mendapatkan support dari kader-kader yang pindah Partai lain karena mereka besar di Golkar sehingga ikatan emosional itu masih ada meskipun beda Partai maka inilah menjadi kekuatan politik Golkar dalam merumuskan sebuah kebijakan. Akan tetapi kader-kader Golkar yang sebelumnya membantai pernyataan dari pengurus Golkar.

“Baik, haubungan sangat baik semua kebijakan pak Bupati. Selama kebijakan untuk masyarakat tidak pernah kami tolak kecuali kebijakan merugikan masyarakat kami tolak, seperti halnya dulu mau dibuatkan patung pak JK di Bone saya tolak, sehingga patung pak JK di Bone tidak ada itu menurutku kabijakan salah, selama ini DPR dan Pemerintah belum ada yang *Urgent* hubungan kita masih baik, kalau ada yang mengatakan ada kongkalingkong pemerintah dan DPR itu oknum saja” (A. Suadi: 25/06/2018)

Tidak semua kader-kader Golkar yang pindah gerbong politik memiliki rasa balas jasa terhadap Partai yang membesarkannya karena tentu masing-masing fraksi yang ada DPRD memiliki kepentingan yang berbeda dan adanya juga beberapa kader Golkar pindah karena adanya kekecewaan dari keputusan Partai

yang tidak berpihak ke kader tersebut. Maka biasa terjadi *Chek and Blance* antara pemerintah dan DPR karena berawal dari kekecewaan. selama ada kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat tentu dari beberapa fraksi akan memperdebatkan hal tersebut meskipun dia kader Golkar sebelumnya akan tetapi jalan terakhir akan selalu ikut ke suara terbanyak karena dengan alasan sistem yang dianut *Kolektif Kolegeal*. Kemudian ditambahkan dari kader Golkar sebelumnya yaitu Abu Khair sekarang menjabat ketua fraksi Nasdem menjelaskan dalam wawancaranya.

“Saya pikir tidak seperti itu, yang seperti kalau kebijakan itu bagus baik kami ikut mendukung meskipun kami sering kritis, saya pikir dari Partai yang membawa kami sudah melebur di DPR tergantung kebijakan itu bagus atau tidak”. (Abu Khair: 24/06/2018)

Setiap kebijakan yang dikeluarkan dari DPRD selalu berakhir dengan musyawarah mufakat berarti perdebatan diinternal DPRD Kabupaten Bone tidak berlangsung lama. tapi siapa yang memiliki kursi yang banyak dan siapa yang membangun koalisi maka mereka lah yang disepakati tawaran-tawarnya untuk menjadi kebijakan publik. Namun peristiwa seperti ini tidak lain dari kebijakan itu disepakati lebih banyak dari tawaran-tawaran dari Partai yang dominan, karena dari anggota lain sering berfikir bahwa apapun kami tawarkan apabila tidak mengajak Partai lain untuk mendukung kita tidak akan jadi kebijakan alias percuma, maka komunikasi politik antara fraksi lain harus saling mendukung program agar tidak di dominasi dari Partai pemenang. Dalam penjelasan dari H. Rahman sebagai ketua fraksi Gerindra.

“Kalau kita itu dalam tawaran program cuman segelintir orang menolak, kita harus mengikut karena DPRD ini sistemnya *kolektif kolegeal*. Golkar adalah Partai pengusung pemerintah maka dari Partai lain harus

menyimbangi untuk memperjuangkan masyarakat. Tetapi kemungkinan besar ada hal-hal tersendiri fraksi lain tidak menyetujui tapi Golkar menyetujui karena dia adalah Partai pemerintah” (H. Rahman; 30/06/2018)

Sebagai Partai penguasa dan Partai pemerintah di Kabupaten Bone tentu memiliki kekuatan tersendiri untuk bisa merumuskan sebuah kebijakan dengan cara membangun komunikasi politik dengan Partai lain untuk mendukung kebijakannya tergantung dari apa tawaran-tawaran politiknya kemudian kedua anggota Golkar di DPRD sebagai mayoritas tentu untuk fraksi dari Partai lain tanpa membangun koalisi dia hanya cenderung menolak akan tetapi tetap tidak akomodir karena Golkar sebagai mayoritas tentu kepentingan pemerintah dan Partainya yang di prioritaskan. Sehingga dari beberapa Partai sering *wolk out* bisa dikata menolak cuman sabatas menolak karena pertimbangan terbesar ada dikubu Golkar dan pendukungnya. Dalam wawancara ketua fraksi Gerindra membenarkan hal tersebut.

“Gerindra pernah *Wolk out* dalam keterlambatan LKPI pemerintah daerah Bone kami tidak setuju karena melanggar aturan dengan undang-undang 23 tahun 2003 dan PP 17, kami menolak dan kami keluar karena jumlah yang pro dengan cuman sedikit” (H. Rahman: 30/06/2018)

Jumlah mayoritas akan mempengaruhi sebuah kebijakan. dalam pengalaman DPRD Kabupaten Bone sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang tetapi ini pada akhirnya disepakati dan disetujui karena berbagai dilematik pada saat itu kurangnya dari Partai minoritas kurang melakukan tekanan politik. Sehingga dengan kursi yang minoritas ini dinamika didalam memutuskan kebijakan tetap dikuasai dari Partai pemerintah atau penguasa. Ini akan berdampak pada masyarakat dalam kebijakan tersebut karena kepentingan yang dibawa dari Partai penguasa adalah kepentingan Partai.

“Tapi kami kadang kala kalau tidak setuju kami menolak dan *walk out* saya juga pernah mengkritisi dari APBD saya cuman menyampaikan bahwa salah satu poin dari sini kami Nasdem tidak mau bertanggung jawab karena kalau mau dipikir sampai *voting* kami tetap kalah karena mereka juga punya *backround* bahwa ini yang benar, tapi sama halnya kami kemarin di pansus keluar karena ada tawaran poin kami ajukan tapi tidak diakomodir” (Abu Khair: 24/06/2018)

Sehingga benar dalam teori kekuasaan menurut Gramski bahwa dominasi kekuasaan cenderung busuk, ambigu, mempesona sekaligus menakutkan. Mempesona karena cenderung dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menguasai dan mengendalikan. Sehingga dominasi kekuasaan cenderung busuk karena dalam pengambilan keputusan di dominasi dari kelompok mayoritas sehingga dalam mencapai dalam sebuah kesepakatan akan berdampak pada masyarakat. Yang terjadi adalah salah gunakan wewenang dan merampas kebebasan dalam berpendapat, dan mutlak dari kebijakan itu hanya untuk kepentingan kelompoknya tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam pandangan penulis bahwa Golkar di Kabupaten Bone wewenang dan kekuasaan yang dimiliki Golkar cenderung untuk menguasai orang lain meskipun secara tidak nampak akan tetapi hal ini terjadi didalam internal DPRD yang dilematik dalam memutuskan sebuah kebijakan. Sehingga yang terjadi adalah berusaha mengendalikan Partai lain agar mereka patuh terhadap Partai Golkar sebagai mayoritas, apabila ini terus terjadi maka DPRD Bone bukan lagi sebagai sarana untuk mencapai kepentingan masyarakat.

Maka praktek politik dari Partai Golkar di Kabupaten Bone sesuai dengan dominasi kekuasaan Menurut Dahendroft yaitu ada enam ciri kelompok dominan atau pemegang kekuasaan yaitu:

1. Jumlah selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai ;
2. Memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk memelihara dominasinya berupa kekayaan materil, intelektual, dan kehormatan moral;
3. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dominan dalam bidang politik sehingga disebut dengan elit penguasa;
4. Dalam pertentangan selalu terorganisasi dengan lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang ditundukkan;
5. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaannya kepada kelas atau kelompoknya sendiri, dan;
6. Ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.

B. Dampak Dominasi Kekuasaan Partai Golkar di Kabupaten Bone Pasca Reformasi

Dalam tubuh pemerintahan daerah Kabupaten Bone apabila menggunakan teori trias politika antara ketiga fungsi Lembaga pemerintahan berfungsi sebagaimana semestinya dan bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, dimana lembaga legislatif harus mengawasi jalannya roda pemerintah daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kemudian lembaga eksekutif menjalankan tugasnya sebagai pemerintah daerah secara professional dan adil kepada masyarakat tanpa membawa kepentingan golongan atau individu. Akan tetapi yang terjadi praktek politik di Kabupaten Bone dimana lembaga-lembaga pemerintahan di Bone dikuasai oleh Partai yang terus mendominasi mulai orde baru hingga paca reformasi saat ini yaitu Partai Golkar. Dominasi Golkar di Bone dengan dua Lembaga tersebut maka terbangunlah sinergitas (kongkalikong) antara keduanya dan saling mendukung dalam kepentingan tertentu sehingga tidak ada *Chek and Blance* dari kedua lembaga tersebut.

Apabila praktek politik ini terus terjadi maka Golkar sebagai Partai yang mendominasi akan terus memperjuangkan kepentingan golongannya diatas kepentingan rakyat. Tentu ini mencederai alur demokrasi kita dimana rakyat tidak mendapatkan ruang gerak demokrasi yang sebenarnya karena dibatasi oleh Partai penguasa, yaitu terjadi pada dominasi birokrasi, dominasi sosial dan dominasi kekuasaan politik. Maka apabila wewenang dari Partai Golkar terus dominan di Kabupaten Bone akan menuai beberapa dampak dominasi kekuasaan dan kepentingan pada masyarakat dan khayalak. Sesuai dengan teori dari (Whindu, 1992) Yaitu:

1. Eksploitasi Kekuasaan

Eksploitasi kekuasaan dari Partai pemerintah dan penguasa telah terjadi di Kabupaten Bone dimana ada penarikan keuntungan secara tidak wajar. Adanya kekuatan Golkar di pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bone menuai berbagai kontroversi dalam sebuah kebijakan karena kepentingan yang dibawa adalah kepentingan kelompok. Dalam wawancara ketua fraksi Gerindra menyatakan bahwa;

“Pengadaan mobil dinas pada saat itu kami komisi I menyoroti kenapa ada pengadaan mobil dinas, menggunakan banyak anggaran jadi untuk apa. Tapi yah dengan dasar alasan kalau nanti pemilihan Bupati tidak ada mobil dinas, dan pada saat itu saya keluar dari situ dan tidak sepekat buat apa lagi. Jadi kita itu kalau kita sedikit mengikut saja. Secara objektif saya tidak menerima”. (H. Rahman: 30/06/2018)

Karena dalam internal DPRD Golkar yang lebih dominan setidaknya sebagai Partai pengusung pemerintah mengabaikan beberapa permintaan dari pemerintah untuk kepentingan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan dari DPR terkait kepentingan dari pemerintah maka bisa dikatakan kedua Lembaga tersebut saling mendukung program karena sama-sama dari Partai Golkar. Kemudian kekecewaan dari masyarakat juga menyampaikan Alumni HMI cabang Bone.

“Adanya kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, salah satunya pengadaan mobil dinas, dan kurangnya pengadaan mobil sampah dan kendaraan dinas semuanya itu minus dari 50%” (Ardianto: 4/6/2016)

Ini dampak dari dominasi Golkar di Kabupaten Bone karena melihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih dominan untuk kepentingan pemerintah dan kebutuhan dari pemerintah itu sendiri. Maka sesuai dengan dasar teori yang ada bahwa Golkar yang dominasi pemerintahan tentu

akan mengeksploitasi kekuasaan dalam arti penarikan keuntungan untuk kepentingan kelompok dan individunya secara tidak wajar.

2. Penetrasi Kekuasaan

Setiap Partai politik yang ada di Indonesia memiliki kesempatan untuk melebarkan sayap perjuangan Partainya setiap daerah dan memiliki cara dan kesempatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini tidak semua Partai dengan mudah merekrut kader Partai disuatu daerah, termasuk beberapa daerah memang sudah menjadi basis massa yang kuat suatu Partai di beberapa daerah diantaranya adalah Jawa Barat dikuasai oleh Partai yang berideologi Islam, Jawa Tengah merupakan basis massa PDIP dengan dasar ideologi Soekarnoisme dan Sulawesi Selatan biasa disebut lumbung suara dan basis dari Partai Beringin. Masihng- masihng wilayah sudah dimasuki semua Partai-Partai baru setelah reformasi banyak terjadi perubahan dimana tidak lagi dikuasai oleh Partai penguasa yaitu Golkar tapi banyak opsi untuk menjadi kader Partai manapun. Namun ada wilayah tertentu memang dalam satu Partai sangat subur mempertahankan eksistensinya sebagai Partai dominan meraih kemenangan baik legislatif maupun eksekutif.

Golkar sebagai Partai yang besar pada masa Soeharto masih mempertahankan eksistensi kemenangannya di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone adalah ladang bagi Partai Golkar untuk menjaga massa, kader dan simpatisan, maka hal ini Golkar di Bone masih terdapat pola pikir masyarakat yang menganggap Golkar adalah Partai masyarakat. Pola pengkaderan Golkar tentu sangat terstruktur dengan baik. Menurut sebagai Pengurus DPD Golkar Bone.

“pada setiap tahun kami rutin melakukan Pendidikan politik dan dialog-dialog diklat-diklat melihat kader fungsional. Ada beberapa kader fungsional pemuda, wanita, pengusaha, petani, dan nelayan dengan berbagai lain profesi mereka dilatih dan melihat kompetensi kemudian evaluasi dan ditempatkan sesuai tempatnya agar terbangun sebuah sistem agar sebelum ada event-event politik kami sudah ada bayangan” (Andi Irwansyah: 21/06/2018)

Tentu ini tetap dijaga untuk melahirkan kader-kader terbaik Golkar di Kabupaten Bone. Menurut pernyataan diatas Golkar di Bone masih bisa merekrut kader sesuai yang dibutuhkan Partai sebagai Partai penguasa memiliki peluang yang lebih besar untuk merekrut kader yang berkualitas dan figur yang bisa dijual ke masyarakat. Pola yang dilakukan cara penjangingannya memang Partai Golkar yang memiliki pengalaman yang lebih matang dengan Partai-Partai baru. Maka dari itu mesin politik dari Golkar lebih siap untuk menghadapi praktek politik yang sesungguhnya, karena kematangan yang dimiliki kader Golkar lebih terarah dan sistematis.

Prinsip Partai politik pada dasarnya yaitu mempertahankan kekuasaannya untuk tetap menjaga eksistensi agar cita-cita dari Partai tercapai sesuai dengan keinginan Partai. Sehingga makna dari penetrasi kekuasaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh elit politik tertentu antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memperoleh, mempertinggi dan memanfaatkan sumber daya yang lain untuk kebutuhan-kebutuhan organisasi yang diinginkan, dan kegiatan penetrasi kekuasaan diluar dari prosedur tertentu.

Penetrasi politik merupakan penekanan pengaruh oleh seorang kepala daerah atau pimpinan politik di daerah dengan tujuan untuk menjaga kekuasaan dari daerah yang dipegangnya. Penetrasi ini dilakukan karena faktor kebijakan-

kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan dari pemerintah daerah dapat diamankan sampai pada tingkat bawah, sehingga kepatuhan antara pemerintah dan bawahan dapat mendukung kebijakan yang ada agar berjalan dengan efektif dan efisien, karena penetrasi yang seharusnya dilakukan secara profesional dan terstruktur agar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik bukan karena kepatuhan terhadap atasan.

Amanat undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki peranan dalam melaksanakan manajemen kepegawaian yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan potensi dan pengembangan jumlah. Berdasarkan dari undang-undang tersebut penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi dan otonomisasi daerah dalam menetapkan kepegawaian atau birokrasi di daerah diwarnai dengan politisasi apalagi pasca diadakan PILKADA akan ada mutasi besar-besaran untuk mengikat para tim pemenang untuk menjabat posisi yang strategis.

Seperti halnya penetrasi kekuasaan yang terjadi di Kabupaten Bone kedudukan sebagai pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan mengangkat kepegawaian daerah. Di Bone pemerintah daerah akan mengangkat para elit birokrasi yang sebelumnya sebagai simpatisan atau tim pemenang Partai akan dimutasi menjadi partner kabinet kerja untuk mencapai cita-cita Bupati sesuai dengan visi-misi pemerintah yang terpilih.

Dalam mutasi pertama dilakukan pada tahun 9 juli 2016 oleh bapak Bupati yang terpilih Andi Fashar Fadjalangi. Sebanyak 48 pejabat eselon II yang digeser dijabat pemerintah daerah. Proses mutasi ini tidak lepas dari kontrak politik antara pemerintah yang terpilih dengan pendukung pemerintah yaitu konsestasi PILKADA adanya balas jasa dari pemerintah yang terpilih. Memang dari pendukung yang loyal yang berhasil memenangkan Andi Fashar Fadjalangi mendapatkan jabatan yang strategis. Dalam wawancara SM selaku LSM di Bone.

“Pada mutasi pertama, kelihatan siapa-siapa yang mengisi jabatan penting. Hal ini dipengaruhi karena kontestasi dari PILKADA yang lalu. Jadi kelihatan orang-orang yang mengisinya dari tim Bupati, mereka yang berjasa dalam memenangkan Bupati, tim-tim loyalitas yang kentara pada saat kampanye mendukung Bupati, dan bisa ditanya, masyarakat tahu itu siapa-siapa pejabat yang termasuk tim iyyana’e atau Tafaddal” (LSM Kabupaten Bone).

Melihat pernyataan diatas penulis menghubungkan antara penetrasi kekuasaan dan dominasi birokrasi antara kepentingan politik yang berujung balas kasi terhadap birokrasi sehingga Golkar sebagai Partai penguasa wewenang untuk mengangkat pendukungnya untuk masuk dalam jabatan yang strategis sangat Nampak, dengan dukungan itu untuk mendominasi Birokrasi yang ada di daerah agar sejalan dengan Visi Misi dari Bupati. Penetrasi politik di Bone yang cenderung adanya ikatan emosional antara penguasa atau pemerintah dengan bawahan dengan menjanjikan dalam bentuk hadiah atau jabatan yang strategis di birokrasi pemerintahan. Sehingga dampak dari penetrasi kekuasaan di Bone birokrasi kurang profesionalitas dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat akan tetapi cenderung tunduk dengan atasannya.

3. Hegemoni Kekuasaan

Praktek politik Golkar di Kabupaten Bone selaras dengan teori Gramsci agar tetap menjadi Partai yang dominasi, langgeng dan abadi. Sehingga pola mengajak simpatisan dan pengkaderannya sesuai dengan catatan Gramsci yang dikembangkan oleh (Heryanto, 1997) yaitu. Dua perangkat kerja yang harus dijaga agar kekuasaan itu abadi. Dalam hal ini Golkar memanfaatkan perangkat kerja yang memang ranah berpolitikannya menyentuh sampai kebawah. Itu masih digunakan sesuai dengan praktek Hegemoni pada masa Orde baru sampai sekarang dengan menguasai Lembaga pemerintahan, organisasi sosial, LSM dan beberapa kelompok-kelompok yang berpengaruh di masyarakat.

Golkar di Kabupaten Bone memang ladang suara terbanyak untuk pada setiap kali pesta demokrasi. Simpatisan dan kader-kader solid yang mengakar sampai pada tingkat desa sehingga kekuatan Golkar di Kabupaten Bone tetap terjaga. Lahirnya politik yang sistematis dan fungsional dari setiap individu kader Golkar yang dapat menarik simpatisan dengan mengajak para tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam satu desa. Memang dalam sejarah Golkar di Indonesia peran dari tokoh masyarakat dilibatkan sebagai kader Golkar baik tingkat lurahh dan kecamatan dan desa semua dilibatkan sebagai alat tempur dari Golkar untuk menjaga massanya. Kader kader Golkar di Bone masih bisa menjaga hal tersebut meskipun skala nasional Golkar runtuh namun di Bone berkat solidaritas dan loyalitas dalam tubuh Golkar tetap menjaga perolehan suara terbanyak.

Dalam perjalanan Golkar dari masa kemasa memiliki karakteristik berbeda dan tentunya ada peningkatan ataupun penurunan, maka penulis mengklasifikasi

pemilih berdasarkan tingkat kecerdasan pemilih mulai dari pemilih pemula dengan standar kecerdasannya mengetahui rekam jejak calon pemimpin, kemudian pemilih yang umur 30-40 tahun yang sudah paham perjalanan politiknya dengan menentukan pilihan calon pemerintah dengan melihat figur meskipun tetap berada intruksi toko masyarakat, kemudian pemilih yang umur 50-60 tahun masih dogma dalam memilih yaitu adanya efek orde baru dengan tertanamnya pola pikir masyarakat Golkar adalah Partai masyarakat.

“Simpatisan itu adalah orang yang menunjukkan kepedulianya terhadap Partai dengan menawarkan program yang menarik dari Golkar melalui ajakan dari kader itulah namanya simpatisan Golkar dan itu jumlahnya lebih besar karena itu massa yang mengambang yang diajak dari kader-kader Golkar itu disebut simpatisan dan kader Golkar itu ada dua yaitu kader tutotarial dan fungsional dimana bergerak sesuai dengan fungsinya seperti halnya kader yang bergerak di bidang pertanian dan pengusaha dia bergerak dengan bidangnya masing-masing” (A. Irwansyah : 21/06/2018)

Perjalanan Golkar saat ini harus melihat jeli dan update dalam mempertahankan eksistensi kemenangannya karena masyarakat Kabupaten Bone saat ini setiap desa sudah terdapat pemuda-pemuda yang memiliki pemahaman yang lebih terbuka dan wawasan ilmunya bertambah, maka masyarakat Bone sudah tertanam jiwa kritis apabila terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat akan berdampak pada pesta demokrasi selanjutnya. Maka hal ini Golkar dalam mengajak simpatisan harus jeli untuk mengajak simpatisan dengan pola penjangingannya yang sistematis dan produktif. Agar tetap bisa mendorong dan memberikan dukungan pada calon-calon pemerintah yang diusung dari Golkar. Dalam wawancara yang dijelaskan Abul dari ketua fraksi Nasdem

“Saya pernah mengajak simpatisan khususnya untuk mengajak dari toko masyarakat untuk masuk Partai kita tapi ada hambatan karena kuatnya Golkar sampai dibawa sehingga orang tersebut menjawab saya ajak dia

harus izin dulu sama kepala desanya dan itu dilarang ikut terlibat Partai lain” (Abu kahir: 24/06/2018)

Sesuai pernyataan diatas bahwa hegemoni kekuasaan Golkar dalam praktek politiknya sangat produktif dalam cara kerjanya beberapa Partai baru di Bone memiliki hambatan tersendiri untuk mengajak simpatisan Partai karena dari Partai penguasa dalam hal ini pemerintah mengintruksikan kepada setiap kepala desa agar menjaga massanya karena akan menjadi ancaman bagi Golkar apabila Partai-Partai baru dibiarkan bergerak untuk mencari simpatisan. Kemudian apabila diantara beberapa kepala desa, lurah dan camat tidak tunduk pada Partai pemegang kekuasaan akan menjadi ancaman ke daerahnya yaitu ancaman akan dipindahkan ke daerah yang pelosok bagi camat dan lurahh. Bagi kepala desa tidak menjadi perhatian pemerintah bagi desa yang tidak mendukung Golkar. Akan tetapi ada juga beberapa desa yang memang sudah memiliki kekuatan tersendiri untuk menjaga masyarakatnya dalam menilai dan menentukan pilihan calon-calon yang diinginkan, kemudian beberapa ketua fraksi dari Partai lain sudah kuat dalam penjangkaran kadernya dan tidak harus takut terhadap hegemoni Golkar yang selama ini. Kemudian diperjelas dalam wawancara mantan kepala desa sekarang menjabat sebagai ketua fraksi Gerindra

“Langkah saya lain, kenapa mau ditanya ke pemerintah setempat carilah simpatisan yang punya peranan dalam desa tersebut kalau seperti itu tidak ada peluang dong karena pasti ada tekanan, karena saat sekarang ini tidak semua desa seperti itu tapi bisa dikata mereka masih mayoritas karena mereka selaku Partai penguasa yaitu Bupati adalah Golkar, Wakil Bupati adalah Golkar, Camat adalah Golkar terus terang saya katakana seperti itu karena Bupati yang mengangkat semua tidak mungkin dia mau angkat lawan politiknya” (H. Rahman: 30/06/2018)

Melihat penjelasan diatas tentu untuk menjaring simpatisan Partai tentu Golkar lebih matan dalam mengajak simpatisn karena dari Partai penguasa tentu

memiliki kekuatan tersendiri seperti halnya simpatisan Golkar sebelumnya diangkat menjadi birokrat dalam hal ini pendamping Bupati untuk memperlancar hubungan politiknya sampai daerah terpelosok. Maka dari itu dia mengangkat dan mendukung program desa yang memang sudah menjadi bagian dari Golkar baik dari simpatisan maupun kader-kader yang ada di daerah. Sehingga dari simpatisan dan kader-kader Golkar yang ada di desa untuk kontrak politiknya dengan atasan dia menjaga massanya dan membatasi ikut terlibat dengan Partai lain.

Padahal dalam undang-undang telah diatur bahwa netralitas kepala desa untuk ikut terlibat politik praktis untuk mendukung satu calon dia harus mengundurkan diri dari jabatannya agar tekanan-tekanan dari pemerintah tidak jatuh kepada kepala desa apabila terpilih dari salah satu pemerintah akan ada berbagai ancaman seperti halnya ancaman mengurangi bantuan kepada desa yang tidak mendukungnya. Maka dampaknya adalah kepada masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan pemerintah akan tetapi netralitas dari kepala desa tidak mendukung pemerintah pemenang maka tidak akan menjadi perhatian dari pemerintah terhadap desanya.

Dalam teori tentang fungsi Partai politik salah satu diantaranya sebagai sarana rekrutmen politik yang disebutkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2008 yaitu Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Tentu langkah yang dilakukan dari Golkar di Kabupaten Bone adanya ketimpangan dengan undang-undang tersebut yaitu membatasi pergerakan dari Partai lain untuk merekrut simpatisan Partai dan tentunya langkah tersebut mencederai alur demokrasi karena toko masyarakat

ataupun masyarakat pada umumnya masih dibatasi ruang geraknya dalam berdemokrasi dalam arti kebebasan memilih Partai ada tekanan dari atasan atau Partai penguasa.

Sama hal yang terjadi dengan beberapa anggota DPRD Bone yang sebelumnya dari kader Golkar akan tetapi tidak mendapatkan ruang untuk diusung maka beberapa diantara mereka memilih kendarahan politik dari Partai lain, sesuai yang dijelaskan Abu Khair sebagai ketua fraksi Nasdem mantan ketua DPC Golkar kecamatan Awangpone

“Sebenarnya persoalan sepele karena saya memang tidak dicover dalam pencalekan meskipun survei kami ini sangat tinggi tapi setelah melihat kondisi pada saat itu masyarakat tetap memaksa masuk karena saya mantan kepala desa maka pada saat itu saya tertarik dengan Nasdem yang susai dengan harapan saya maka dari itu saya mengundurkan diri dari Golkar karena saya pikir semua orang memiliki hak untuk mencari peluang” (Abu Khair: 24/06/2018)

Banyak hal akan bisa terjadi dari kader-kader Golkar untuk memisahkan diri dari Golkar salah satunya ingin mendapatkan ruang untuk masuk di legislatif sehingga memilih Partai lain untuk dijadikan kendarahan politiknya. Sama halnya penjelasan dari Suaedi mantan Kader Golkar pindah ke Demokrat.

“Sebenarnya saya hijrah karena saya mencari yang seideh dan sepaham dengan saya intinya bahwa sepanjang dengan jalur kita sama cari dengan Partai yang seideh dengan kita sesuai dengan kepentingan rakyat. adanya faktor lain adalah salah satunya persaingan internal artinya ada kader-kader baru dengan adanya kedekatan dengan ketua Partai Golkar sehingga kader-kader lama ini tidak diperhatikan, karena waktu itu menurut survei saya yang tertinggi sehingga lawan-lawan politik saya di Golkar tidak mau, maka dari politik itu kapan saya nyaman disitulah saya dan kapan tidak nyaman saya tinggalkan karena pada saat itu saya dituduh tidak memberikan dukungan Ambo Dalle dan Tafaddal maka saya mengundurkan diri” (Suaedi: 25/06/2018)

Inilah indahny sebuah peta politik dimana keberpihakan bisa menyelamatkan para politisi dan begitu pula sebaliknya bisa menjerumuskan lubang politik yang berujung pahit maka inilah dinamika politik yang sebenarnya. Golkar di Bone memang memiliki massa yang banyak begitupun dengan kader-kadernya, namun nafas dari Golkar tidak akan berlangsung lama apabila kader-kadernya sudah tidak loyal dengan Partainya keberpihakan Partai terhadap kader akan bisa menjadi ancaman bagi Golkar. Karena kondisi saat ini masyarakat tingkat pemahamannya dalam politik sudah meningkat dalam arti figur sekarang lebih kuat dari pada Partai, apakah Golkar akan terus membiarkan fenomena seperti ini dan apakah ada langkah yang dilakukan agar Golkar di Bone tetap bisa menjaga perolehan kursi dan suara terbanyak. Kasus ini terjawab sesuai dengan jawaban dari Andi Irwansyah selaku pengurus Golkar.

“Kepatuhan kader tergantung pada kebijakan dari atasan Partai ketika ada hal yang tidak disetujui maka mereka keluar dan sesuai rekam jejak saya banyak Partai meminati dari kader Golkar karena kader-kader terbaik ada di Golkar Partai tertua. pendapat saya pribadi saya tidak pernah khawatir kalau mereka berpindah dan saya tetap optimis meskipun orangnya berganti karena ini merupakan pilihan hidupnya akan tetapi kader sekarang ini tetap konsisten dengan asas-asas dari Partai” (Andi Irwansyah: 21/06/2018)

Dari pernyataan diatas, Golkar dalam pengkaderannya tetap bisa menjaga eksistensinya apabila dari atasan Partai tidak memunculkan kontra dengan kader-kadernya dan tetap konsisten dengan intruksi Partai. Fenomena dari Golkar di Bone dari berbagai kader meminati Golkar untuk dijadikan kendarahan politiknya namun untuk mengantarnya jadi pemerintah tentu ada kesepakatan yang harus tetap dipatuhi dari kader-kader itu sendiri. Agar kekuatan Golkar akan tetap

terjaga. Dalam penjelasan Ambo Dalle tentang regulasi pengkaderan yaitu adanya pembaharuan.

“Pola pengkaderan dulu itu yang handal adalah karakterdes dan fungsional sekarang berbeda karena sistem multi Partai sekarang tetap ada itu tapi pendekatannya yang berbeda” (Ambo Dalle: 13/06/2018)

Namun tidak semua kader-kader yang di rekrut semua patuh terhadap Golkar dalam hal ini elit-elit politik Golkar di Bone berharap agar bisa diusung dari Golkar namun kompetisi diinternal Golkar itu sendiri lebih dinamis. Karena Golkar memiliki kader-kader terbaik dan figur yang baik akan tetapi jika beberapa elit Golkar menginginkan jabatan atau duduk di bangku pemerintahan tentu tidak semua memiliki kesempatan yang sama maka dari itu ada beberapa kader-kader Golkar di berhentikan ataupun mengundurkan diri agar bisa diusung dari Partai lain. Tapi tetap harus diakui bahwa kekuatan Golkar masih banyak politisi yang bergantungkan dirinya terhadap Golkar sama halnya dalam pernyataan pak suaidi

“kalau ade perlu ketahui meskipun kader-kader banyak keluar, tapi perlu diakui bahwa Golkar itu tidak butuh calon tapi calon-calon politisi butuh sama Golkar”. (Suaidi: 25/06/2018).

Maka pada tahun 2013 ada peristiwa menarik dalam tubuh Golkar terjadi dinamika penetapan Calon Bupati di Kabupaten Bone yang berujung perpecahan internal Partai Golkar termasuk ketua DPD pada saat itu mengundurkan diri yaitu Idris Galigo dan juga sebagai mantan Bupati Bone. Beberapa dari kader Golkar memilih kendarahan politik yang lain karena adanya kompetisi internal Golkar yang harus keputusan akhirnya keluar dari Golkar yaitu Suaedi kader Golkar pindah ke Demokrat sekarang fraksi Demokrat DPRD periode 2014-2019 kemudian Abul khair mantan ketua DPC Golkar di kecamatan Awangpone sekarang menjadi ketua Fraksi Nasdem di DPRD 2014-2019. Tentu ini beberapa

elit-elit Golkar tidak memiliki kesempatan yang sama sehingga lebih memilih kendarahan politik yang lain. Penjelasan Ambo Dalle selaku Wakil Ketua DPD II Golkar Bone.

“Partai Golkar menganut sistem survei apakah kader maupun nonkader pada saat itu yang memenangkan survei A. Fashar, anaknya Bupati waktu itu tidak memenangkan survei akhirnya dia tidak dicalonkan maka pada saat itu anak Bupati independent karena Partai tidak ada yang mendukung maka begitulah sistem survei yang digunakan pada 2013. Dampaknya ketua Partai Golkar pada saat itu diberhentikan karena tidak patuh dengan Partai, maka terjadilah perpecahan internal tapi Golkar pada saat itu cepat diselesaikan perpecahan internal” (Ambo Dalle: 13/06/2018)

Golkar di Kabupaten Bone memiliki kader-kader terbaik namun jika kader semua ingin maju ke arena politik kader harus tunduk dengan keputusan Partai jika tidak silahkan mencari gerbong politik lain. Karena pola yang dilakukan Golkar sangat dinamis dalam menetapkan seorang calon yang akan diusung di pertarungan politik. Memang ada kekecewaan beberapa elit Golkar namun yang memicuh akan terjadinya perpecahan Golkar di Bone maka akan dilakukan antisipasi perpecahan. Maka hal ini sangat dinamis akan tetapi Golkar sangat giat dalam memecahkan masalah dan memiliki pengalaman yang baik dalam menghadapi masalah sehingga perpecahan itu tidak memiliki dampak yang besar bagi Golkar itu sendiri.

Faktor kuatnya Golkar di Bone dalam perjalanan selama ini ikut andil dalam pesta demokrasi kaderisasi dari Golkar sangat terstruktur sampai pada pelosok desa dengan cara seperti inilah Golkar menjaga kader-kader terbaiknya. Dominasi Golkar di Bone dari pasca reformasi sampai saat ini kader-kader Golkar sangat berpengalaman dalam peta politik di Bone dimana orang-orang terbaik desa ada keterlibatan dengan kader-kader Golkar untuk mengharuskan dirinya

menjadi simpati dari Golkar karena dengan dorongan kader Golkar yang solid, dengan menjaga ikatan emosional terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Maka suntikan-suntikan pemahaman dan tawaran dari kader-kader Golkar memang masih mengikat hati masyarakat untuk tetap mendukung Partai Golkar.

Berbagai cara yang digunakan Partai Golkar untuk menjaga massanya dengan langkah yang digunakan sesuai dalam pandangan Gramsci yaitu: langkah dari Lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan tersendiri untuk meloby dan mengajak masyarakat, kemudian bergerak sampai ranah kepolosok adalah langkah kedua yang bergerak itu kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, nelayan dan petani. Agar dalam pesta demokrasi Golkar tetap subur meraih suara terbanyak.

Adapun bentuk-bentuk kekuasaan menurut Frech dan Reven (dalam Basrowi, 2005: 114) dan dihubungkan dengan hegemoni kekuasaan Golkar di Kabupaten Bone Bentuk-bentuk kekuasaan menurut Frech dan Reven yaitu:

a. Kekuasaan Paksaan (*Coercive Power*)

Perlu diketahui bahwa kekuatan Golkar di Bone masih terjadi unsur paksaan dalam menentukan pilihan namun secara tidak sadar terkadang hal ini akan selalu terjadi dalam prakteknya, mengapa karena sedikit banyaknya kader-kader Golkar dalam melakukan loby terhadap perangkat desa, lurahh atau camat di Bone. Pasti selalu merasa ada tekanann dari atasan apabila wilayahnya tidak mendapatkan suara terbanyak. Sehingga apa yang terjadi kemudian

adalah terjadi pemindahan camat atau lurahh, kemudian desa menerima ancaman akan tidak diberikan bantuan-bantuan sosial. Maka singkat kata Hegemoni Kekuasaan Golkar di Bone tidak terlihat secara kasat mata akan tetapi masih terjadi sampai sekarang. Menurut (Basrowi, 2005: 114). *“Bentuk ini merupakan kemampuan untuk memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti pemimpinnya. Dari sisi orangnya ia mempunyai penguasaan, kemampuan untuk menguhukum atau memermalukan seseorang yang tidak melakukannya dan orang lain mempunyai rasa takut terhadap orang tersebut. Alasannya untuk mentaati kekuasaan paksaan berupa rasa takut, baik fisik maupun non fisik, seperti dipukul, diancam, ditangkap, dipenjarakan, atau dibunuh dan non fisik misalnya kehilangan pekerjaan, dikucilkan dan intimidasi”*. Seperti halnya dalam mutasi jabatan dari beberapa pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bone yang seharusnya Bupati Bone tidak melakukannya. Karena pada dasarnya Bupati memiliki hak prerogatif untuk memutasi para pegawai dan itu diatur dalam undang-undang tapi perlu diingat bahwa apakah perlu setiap kepemimpinan baru atau apakah setiap mendekati pemilu kada harus dilakukan mutasi. Jika diperhartikan memang ini hanya sebatas kepentingan politik semata. Seperti yang dilansir dalam surat kabar kompas.com ditulis oleh Abdul Haq 11 maret 2014.

“Puluhan siswa SMA tiba di kantor DPRD. sekitar pukul 11.30 yang diketuai Anjas selaku Ketua Osis, tuntutan pelajar ini

mendesak agar kepsek mereka, Abdul Aziz yang sebelumnya menjabat sebagai kepala SMA 1 Bengo, tiba-tiba dimutasi dan dijaadikan guru bantu di SMA 1 lamuru, Kecamatan Lamuru”

Kemudian salah satu anggota DPRD berkomentar terkait tuntutan dari pelajar tersebut.

“Mutasi memang hak prerogatif Bupati, tetapi bagusnya bagusnya harus melihat uji kelayakan, jangan sampai yang diberikan jabatan tidak sesuai dengan keahliannya” kata Andi Mappamadeng

Kemudian dari salah satu anggota DPRD kembali menanggapi terkait tuntutan pelajar tersebut. Namun jika dilihat dari background Andi Akbar adalah anggota DPRD yang diusung dari Partai Golkar yang mengatakan;

“saya kira mutasi ini sudah sesuai prosedur yang ada. Bahkan kalau kita mau jujur, jabatan kepala sekolah itu hanya berlaku dua tahun tidak boleh lebih” jelas Andi Akbar.

Jika dilihat kejadian tersebut akan berdampak kepada kebutuhan pelajar yang memang benar-benar membutuhkan sosok kepala sekolah yang mumpuni dan sesuai kualitasnya. Pelajar sebenarnya meminta pemerintah jangan semena-mena menurunkan jabatan hanya kepentingan politik saja. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi setelah momen politik sudah bergulir, siapa yang bagian dari simpatisan pemenang maka bisa saja memiliki jabatan yang strategis.

Hegemoni kekuasaan juga kerap terjadi pada masa kepemimpinan Idris Galigo sebagai ketua DPD Golkar saat itu. Kepemimpinan Idris Galigo yang dikenal sosok yang tegas dan keras sehingga masa kepemimpinan beliau kader-kader Golkar patuh

terhadap apa yang menjadi intruksi Partai. Sistem yang digunakan seusai dengan teori Basrowi tentang kekuasaan paksaan yaitu jika ada beberapa kader-kader atau simpatisan yang membangkan langsung diberikan *funiusment* yang kerap terjadi adalah memberikan ancaman bahkan pemberhentian. Sesuai dengan penjelasan A. Irwansyah sebagai pengurus senior Golkar di Bone.

“Pak baso ini sekarang lebih moderat kalau Puang Deri keras, kapan ada ketahuan tidak mengerjakan langsung *Funishment*. (A. Irwansyahh 24/06/2018)

Dari hegemoni kekuasaan masa Idris Galigo Golkar pada saat itu masih subur dalam perolehan kursi DPRD dengan meraih 28 pada tahun 2004 dan 18 kursi 2009. Kepatuhan kader untuk menjalankan tugasnya tergantung bagaimana sikap dari sosok pemimpin apakah dia mampu menekan pergerakan kader-kadernya dan simpatisannya agar tetap sebagai Partai penguasa.

b. Kekuasaan Imbalan (*Insentif power*)

Kekuasaan imbalan adalah pematuhan dicapai berdasarkan kemampuan untuk membagikan imbalan yang dipandang orang lain sebagai berharga. Imbalan adalah sesuatu yang meningkatkan frekuensi kegiatan seorang pegawai (Basrowi, 2005: 114). Dengan kekuasaan imbalan maka disebut kekuasaan diraih atas balas jasa sehingga ini bukan suatu yang lumrah ditatanan demokrasi kita. Hal seperti ini sudah sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Setelah ditetapkannya aturan desentralisasi bahwa masing-masing daerah

berhak menagtur rumahnya tangganya sendiri. Sehingga keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan daerah serba di Politisasi. Maka dari sini bisa diperhatikan bahwa setiap daerah siapa yang memiliki kekuatan atau massa yang banyak maka dialah punya kekuasaan.

Penulis akan menggambarkan konsep kekuasaan imbalan yang terjadi di Kabupaten Bone. Kekuasaan Golkar yang selama ini selalu ada praktek politik balas jasa setiap pasca pemilu, setelah pengangkatan dan pelantikan Bupati yang terpilih pasti akan ada nama-nama baru yang muncul di kabinet pemerintahan sebagai bentuk imbalan bagi orang-orang atau tim pemenang. Saya pikir ini bukan terjadi Kabupaten Bone hampir setiap daerah ada praktek seperti ini akan tetapi fokus penelitian penulis di Kabupaten Bone. Hasil wawancara H. Rahman.

“Partai penguasa yaitu Bupati adalah Golkar, Wakil Bupati adalah Golkar, Camat adalah Golkar, itu saya terus terang katakana seperti itu dek, karena Bupati yang mengangkat semua tidak mungkin dia angkat lawan politiknya”. (H. Rahman: 30/6/2018).

Kedudukan Golkar sebagai Partai penguasa jelas dalam kabinet kerja pemerintahan Bone mayoritas dari Golkar. Inilah yang disebut kekuasaan imbalan jadi sebagai rasa balas jasa terhadap tim pemenang harus ikut membantu dalam birokrasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita bersama. sesuai kabar berita yang dimuat Sindownews.com

“Berdasarkan informasi yang terhimpun ada 27 camat, termasuk seccam dan lurahh yang positif di ganti. Saat ini,

nama-nama itu sudah berada di tangan Bupati Bone Andi Fashar Fadjalangi. Ke-27 camat tersebut, sebagian besar akan berpindah ke struktur dinas alias nonjob”.

“ada yang berpindah ke struktur dinas dan sisahnya ada yang rolling ke wilayah yang lain. Eselon mereka tetap, tapi posisi dan wilayah kerja diganti. Soal siapa camat itu, saya belum bisa paparkan”. (Sindownes.com. Kamis, 11, Juli, 2013).

Sebenarnya ada pergeseran kekuasaan antara Idris Galigo yang beralih ke Andi Fashar Fadjalangi sebagai Bupati baru. Mereka sama-sama dibesarkan oleh Golkar karena persaingan politik dengan ego masing-masing alhasil ada perselisihan antara keduanya. Dengan terbentuknya tim sukses dari kedua kubu tersebut dengan melibatkan para PNS, Camat dan Lurah/Desa. Yang memang sudah ada ikatan kekerabatan dimasing-masing kubu. Pasca dari pemilihan kelihatan siapa saja yang akan di mutasi jabatan karena singkat kata pada saat itu anak mantan wakil Bupati kalah sehingga kabinet kerja dari Bupati sebelumnya akan di mutasi dengan kabinet-kabinet kerja dari tim pemenang A. Fashar Fadjalangi.

Dari pandangan penulis bahwa kedudukan Golkar memang ada hegemoni yang tercipta melalui kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan sesuai praktek politik Golkar di Bone dimana para tim pemenang akan diberi hadiah yang berupa jabatan yang strategis dan yang bukan kawan politik akan diberhentikan dari jabatan sebelumnya. Maka sejatinya Golkar dan Bupati yang terpilih akan merombak besar-besaran kabinet kerja Pemerintahan. Jika ada berombakan kabinet

kerja di pemerintahan harapan dari masyarakat mudah-mudahan
bukan sekedar kepentingan akan kekuasaan politiknya.